



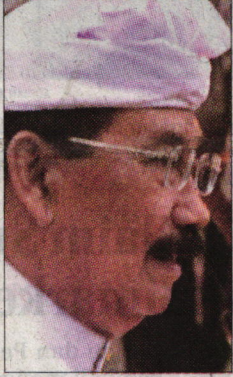
Kejari Sita LPJ Tirta Yatra



Kasus Tirta Yatra Badung

- Tim Kejari Denpasar mendatangi Kabag Hukum Badung Komang Budi Argawa.
- Tim menyita laporan pertanggungjawaban (LPJ) tirta yatra ke Gunung Salak (di Inspektorat) dan tirta yatra ke India (di Dinas Kebudayaan)
- Bupati Badung, AA Gde Agung mengaku tak melihat legalitas PHDI yang menerima dana hibah tirta yatra. Yang penting adalah bermanfaat bagi umat.

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI



Saya tidak melihat (PHDI) legal dan ilegal. Yang penting bermanfaat bagi umat.”
AA GDE AGUNG
Bupati Badung

Rekanan Reklame Denpasar Diperiksa

DENPASAR - Kasus dugaan korupsi tirta yatra ke Gunung Salak di Inspektorat dan ke India di Dinas Kebudayaan Badung kembali didalami. Kali ini tim jaksa langsung melakukan penyitaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) tirta yatra yang ada di Bagian Hukum Pemkab Badung.

“Tim jaksa pagi - pagi sudah buat geger Badung. Mereka mencari data - data terkait dugaan korupsi di Badung,” ujar sumber koran ini di Kejari Denpasar. Dikonfirmasi ke Kasi Intel Kejari Denpasar Syahrir Sagir membenarkan bahwa pihaknya sudah selesai mengobok - obok Badung.

► *Baca Kejari...* Hal 51

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 41



Bupati Tak Lihat Legal atau Ilegal

■ KEJARI...

Sambungan dari hal 41

"Sudah dapat data. Saya sudah balik ini," jelas Syahrir kemarin (20/4).

Dia mengatakan, sudah masuk ke ruangan Kabag Hukum Badung, kemudian menemui Kabag Komang Budi Argawa. "Kami minta LPJ. Data ini penting untuk bisa nanti mendalami dugaan - dugaan penyimpangannya," jelasnya.

Dia mengatakan sudah dapat data LPJ dari kasus ini. Nantinya akan dipelajari, untuk men-

cari fakta - fakta dugaan jika ada perjalanan fiktif untuk ke India atau *tirta yatra* Gunung Salak di Inspektorat.

Bagaimana dengan lembaga penerima hibah ilegal (PHDI ilegal)? Dia mengatakan selanjutnya jelas akan masuk ke PHDI. Nanti akan dikembangkan. Data - data untuk mencari dugaan permainannya. Termasuk kemungkinan lembaga yang tidak sah, malah mendapatkan dana hibah untuk *tirta yatra* ke India. "Termasuk aliran dana yang lainnya," ungkap Syahrir.

Seperti halnya berita sebelumnya, empat pejabat Badung yang sebelumnya diperiksa adalah Kadis Kebudayaan IB Anom Basma, Kepala Inspektorat Ni Luh Suryanti, Kabag Hukum Komang Budi Argawa, dan Kabag Keuangan Ketut Gede Suyasa. Atas kondisi ini pihak Badung melempar bahwa dana itu hibah ke PHDI pimpinan Sukada.

Penjelasan ini sebenarnya untuk mengalihkan, namun malah membuka aib. Lantaran terungkap bahwa PHDI yang diberikan dana hampir satu

miliar itu adalah PHDI ilegal. Pihak PHDI sudah menyikapi hal ini dan mendesak agar dituntaskan kasus ini.

Sayang, Komang Budi Argawa tidak bisa ditemui. Saat didatangi ke ruang kerjanya dia tidak ada. Hanya ada sekretaris pribadi (sekpri) Budi Argawa.

"Bapak (Budi Argawa, Red) tidak ada. Bapak ke luar sedang rapat," ujar Sekpri Budi Argawa kepada koran ini. Ditanya apakah ada tim dari kejari yang datang menyita dokumen? Sekpri Budi Argawa ini mengatakan tidak ada tim dari kejari



Radar Bali

Sambungan -

yang datang. "Tidak ada yang datang," ucapnya singkat. "Tidak ada siapa-siapa dari pagi. Bapak ikut rapat dari pagi," imbuhnya singkat.

Sementara itu, Budi Argawa saat coba dihubungi melalui sambungan telepon tidak ada jawaban. Pun saat dikirim pesan singkat SMS, hingga berita ini selesai ditulis kemarin petang tidak juga dibalas. Di sisi lain, Bupati Badung AA Gde Agung kepada awak media usai rapat pengarahannya LAKIP bersama jajarannya, mengatakan dirinya tidak melihat aspek legal maupun ilegal PHDI Kabupaten Badung yang menerima dana hibah *tirta yatra* ke India. "Saya tidak melihat (PHDI) legal dan ilegal. Yang penting bermanfaat bagi umat," ucapnya kepada wartawan.

Sementara itu, Kejati Bali kembali menindaklanjuti kasus Pemkot Denpasar. Ada tiga pihak rekanan yang dipanggil untuk mendalami pemeriksaan di Kejati Bali terkait dugaan korupsi atau mafia izin reklame. Hal itu didalami oleh tim jaksa yang dipimpin oleh Made Subawa. "Ada tiga lagi rekanan. Artinya, pihak-pihak yang terkait reklame yang diperiksa," ungkapnya.

"Orang - orang ini terkait dengan reklame atau billboard di Kota Denpasar," lanjutnya.

Sayangnya, koran ini tidak berhasil mendapatkan nama - nama dari orang - orang ini. Dikonfirmasikan ke Kasipenkum Kejati Bali Ashari Kurniawan membenarkan bahwa ada pemanggilan tiga orang lagi. "Rekanan dipanggil, tapi apakah datang tidak saya belum cek. Yang pasti memang memanggil orang lagi," ungkapnya.

Sebelumnya, tim reklame yang diperiksa sudah banyak. Mereka adalah Kadispenda, Kadis DKP, Kadis DTRP, Kepala Satpol PP, Kadishub, dan lainnya. (art/san/yes)



Mantan Inspektur Dipolisikan

Bersama Tiga Orang Mantan Ajudan Winasa

NEGARA - Langkah mantan Bupati Jembrana, I Gede Winasa untuk mencari keadilan ternyata tidak setengah hati. Ia melalui kuasa hukumnya,

Nengah Nurlaba, segera melaporkan mantan Inspektur Inspektorat Pemkab Jembrana, Ketut Arimbawa ke polisi. Ia dilaporkan bersama tiga mantan ajudan Winasa karena dinilai menyerahkan data dan dokumen perjalanan dinas palsu kepada bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Winasa melalui kuasa hukumnya, Nengah Nurlaba mengatakan, peran Arimbawa saat itu sebagai Inspektur Inspektorat Pemkab Jembrana tahun 2009-2010. Seharusnya sebagai Inspektur, Arimbawa memberikan Surat Keputusan (SK) Tuntutan Perbendaharaan.

► Baca *Mantan...* Hal 51

Arimbawa Sebut Winasa Enggan Teken

■ MANTAN...

Sambungan dari hal 41

dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) kepada Winasa sebelum kasusnya diselesaikan lewat proses hukum. Namun menurut Winasa, hal ini tidak dilakukan Arimbawa selaku Inspektur saat itu sehingga menyebabkan kasus ini harus diselesaikan secara hukum.

Selain Ketut Arimbawa, Winasa juga melaporkan tiga orang mantan ajudannya saat menjabat Bupati Jembrana tahun 2009-2010. Mereka adalah Oka, Nanda dan Dandit. Ketiganya dinilai Winasa memberikan dokumen dan keterangan palsu. Dokumen palsu dituding Winasa diberikan ketiga mantan ajudannya ini kepada bendahara dan PPTK untuk diproses menjadi surat pertanggungjawaban.

Akibatnya, kasus perjalanan dinas ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selain memberikan dokumen palsu kepada pihak terkait, ketiganya juga dinilai memberikan keterangan palsu saat diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara. Terutama dalam masalah pembelian 63 tiket perjalanan dinas yang dinilai palsu dan

sekarang menjadi barang bukti di penyidik," tegas Nurlaba.

Pelaporan ini dilakukan setelah Winasa dan Nurlaba melakukan diskusi panjang untuk menentukan siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kasus dokumen dan data palsu yang beredar. Ia mengatakan, kalau tiket yang menjadi barang bukti di tangan penyidik Kejari Negara sekarang adalah palsu, berarti ada tiket asli. Namun ia mengaku tidak

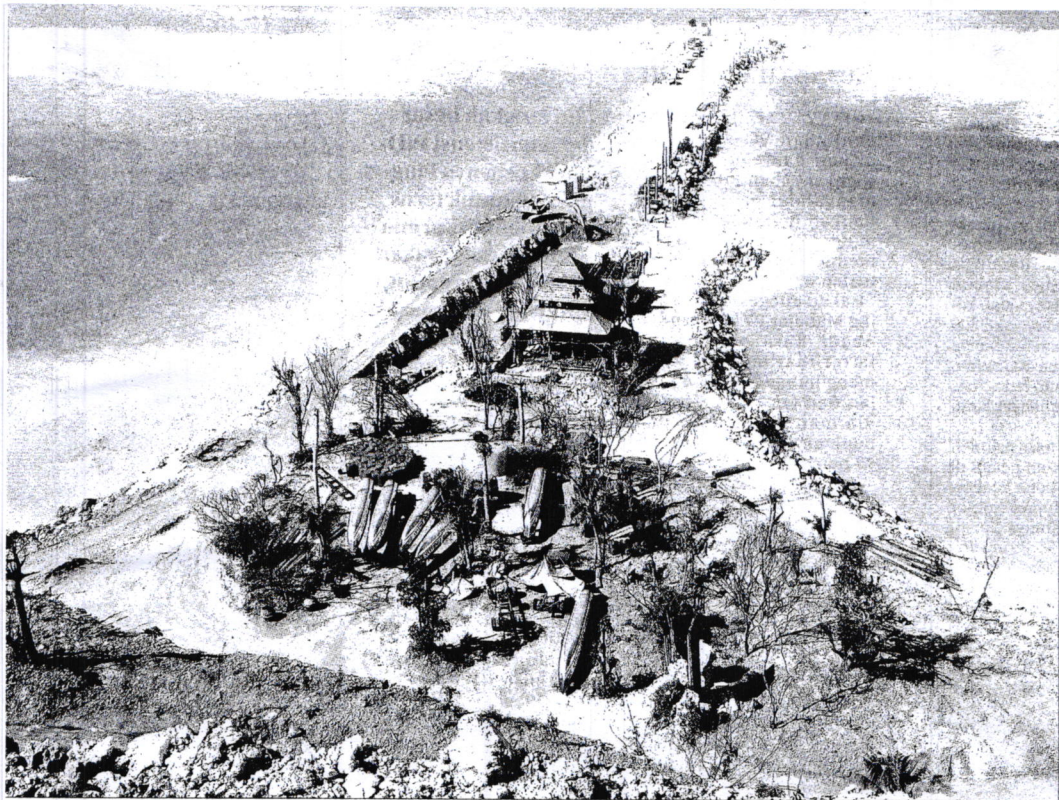
tahu di mana tiket asli tersebut disimpan. Tiket ini harus dicari agar bisa dicocokkan dengan tiket palsu tersebut.

Ia juga mencium ada gerakan terstruktur untuk memojokkan dirinya. Pengakuan tiga orang mantan ajudan Winasa yang membeli 63 tiket tersebut kepada Ami merupakan keterangan palsu. Sebab tidak mungkin Ami menjual tiket. Karena dia bekerja sebagai staf biasa di Klinik Anita milik Winasa di Denpasar. "Seingat saya, Ami hanya membelikan tiket buat saya setelah saya tidak jadi bupati lagi. Saat itu dia membeli tiket untuk saya dan para saksi yang akan menghadiri sidang pemilihan Bupati Jembrana di Mahkamah Konstitusi (MK)," terang Nurlaba saat ditemui koran ini kemarin.

Ketut Arimbawa yang dikonfirmasi

masi terpisah mengaku pihaknya sudah melakukan pekerjaan sesuai prosedur yang berlaku. Ia mengaku pernah menelepon Winasa untuk menyampaikan ada temuan BPK yang harus ditindaklanjuti. Setelah itu, ia juga sudah mengirim beberapa stafnya untuk membawa surat jaminan penyelesaian pembayaran kerugian negara dari hasil temuan BPK tersebut yang harus ditandatangani Winasa saat itu.

Namun setelah beberapa kali dikirim surat, Winasa enggan membubuhkan tandatangan karena mengaku bukan dirinya yang bertanggung jawab, melainkan pengguna anggaran. "Merujuk pada struktur di Pemkab Jembrana, yang bertindak sebagai pengguna anggaran adalah Sekda Jembrana," papar Arimbawa. (don/yes)



DIURUK: Proyek pengurukan pantai yang dilakukan warga Desa Ungasan ini ditargetkan selesai Juni 2016.

Habiskan Rp 8 M, Tak Kantongi Izin Pengurukan Pantai Melasti Ungasan

UNGASAN- Bukit dan tebing di potong. Pantai diuruk. Itulah yang terjadi di daerah Badung Selatan. Salah satu proyek pengurukan pantai yang paling besar dan mencolok saat ini adalah Pantai Melasti di Desa Ungasan ■

Penataan Pantai Melasti

- Pengurukan pantai berbentuk anjungan sepanjang 80 meter.
- Dana yang sudah dihabiskan sekitar Rp 8 miliar berasal dari swadaya masyarakat Desa Ungasan.
- Untuk menyelesaikan proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 20 miliar. Meski sudah berjalan, pihak desa belum mengurus perizinan.
- Pengurukan ini akan difungsikan untuk keperluan upacara seperti nganyut sekah atau mendem pekelem.
- Selain kepentingan upacara, juga akan digunakan sebagai obyek pariwisata dengan fasilitas penunjang seperti panggung pertunjukan kecak, gazebo dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya.

CATATAN: Jika pemerintah pusat tidak mengizinkan, pihak desa akan memperuntukkan saat upacara adat saja.



GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

Edisi : Selasa, 21 April 2015

Hal : 41



Sambungan..

Kalau Dilarang, Dipakai Saat Upacara Saja

■ HABISKAN...

Sambungan dari hal 41

Kecamatan Kuta Selatan. Pantai ber-laut biru itu diuruk ke arah tengah laut menyerupai dermaga. Tidak tanggung-tanggung, panjang pengurukan ini sekitar 100 meter. Di lapangan masih terdapat alat berat dan bangunan semi permanen berdiri. Yang mengejutkan, ternyata pengurukan pantai ini belum mengantongi izin.

"Nantinya akan dikelola desa adat itu. Harapan kami sebelum Juni 2016 sudah bisa dibuka secara resmi. Memang sekarang sudah ada pengunjung, tapi belum ditata seperti Pantai Pandawa mengenakan tiket ke pengunjung," papar Perbekel Desa Ungasan Wayan Sugita Putra melalui sambungan ponselnya kemarin (20/4).

Soal izin, Sugita mengaku proyek penataan ini belum mengurusnya. Sugita mengaku akan berupaya mengurus legalitas proyek tersebut ke instansi berwenang.

Selain untuk kebutuhan tempat ritual bagi masyarakat setempat, pengurukan pantai itu juga dapat dimanfaatkan sebagai tambatan perahu-perahu kecil milik wisatawan. Ditambahkan, nantinya fasilitas penunjang pariwisata itu akan dilengkapi dengan panggung pertunjukan kecak, gazebo, dan fasilitas pendukung pariwisata lainnya. Namun demikian, jika pemerintah pusat tidak mengizinkan, pihaknya akan memperuntukan saat upacara adat saja. "Jika tidak diizinkan, kami akan memasang portal agar tidak ada yang masuk ke wilayah itu. Kami akan memanfaatkan hanya untuk upacara adat, ketika tidak ada upacara adat akan ditutup," imbuhnya.

Penataan Pantai Melasti ini menurutnya murni memanfaatkan dana swadaya dari masyarakat desa, dengan biaya yang telah dihabiskan hingga kini hampir Rp 8 miliar. Diperkirakan menghabiskan dana kurang lebih Rp 20 miliar hingga semuanya tuntas. Menurut Sugita, panjang anjungan ini sekitar 80 meter menjorok ke laut. Itu nantinya

difungsikan untuk *nganyut-nganyut sekah* saat upacara ngaben atau *mendem pakelem*. "Sebab, kalau tidak dibuat begitu, kami biasanya nyewa perahu atau minta bantuan Basarnas," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan (Disnakkalaut) Kabupaten Badung I Made Badra menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin apa pun. Begitu juga dengan pengajuan izin tidak pernah masuk dan diterima Disnakkalaut. "Tidak ada proposal yang masuk dan tidak pernah mengeluarkan izin," tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Cipta Karya (DCK) Kabupaten Badung Ni Putu Dessy Darmayanti saat dihubungi mengatakan belum mengetahui keberadaan proyek tersebut. Bahkan, pihaknya tidak mengetahui persis proyek penataan pantai yang kerap dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai tempat menggelar ritual melasti bagi umat. "Sudah lama itu (proyek penataan, Red). Coba saya cek dulu. Kami belum tahu," tandasnya. (san/yes)